



**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 3300 / K.1 / PDP.09
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Hasil Sidang Penilaian Akreditasi
Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Provinsi Jambi Tahun 2019

Jakarta, 18 Juli 2019

Yth. **Sekretaris Daerah Provinsi Jambi**
di
tempat

Berdasarkan Peraturan Kepala LAN Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah, LAN selaku instansi pembina diklat memiliki tugas untuk melakukan akreditasi Lembaga Pelatihan Pemerintah. Akreditasi ini bertujuan untuk memberikan penjaminan kualitas penyelenggaraan pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) serta memberikan saran perbaikan guna peningkatan kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pelatihan.

Salah satu proses dalam akreditasi adalah Sidang Penilaian Akreditasi, yang menjadi sarana pengambilan keputusan dari rangkaian proses penilaian. Untuk **Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi** telah dilakukan sidang akreditasi pada tanggal 18 Juli 2019 dengan hasil sebagaimana terlampir disertai catatan rekomendasi untuk perbaikan ke depan.

Demikian kami sampaikan. Kami sangat mengapresiasi upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan standar penyelenggaraan pelatihan sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan hasil akreditasi ini kami berharap kualitas penyelenggaraan pelatihan di lingkungan instansi Saudara akan semakin meningkat.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.



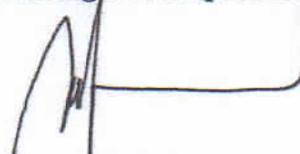
Tembusan:
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi.

Lampiran Surat No : 3380/K.1/POB.09

**HASIL PENILAIAN
AKREDITASI LEMBAGA PELATIHAN
TAHUN 2019**

- A. Lembaga Pelatihan** : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi
- B. Program Pelatihan** :
- | | |
|-----------------------------------|-------------|
| 1. Pelatihan Kepemimpinan Tk. III | : 87,24 (B) |
| 2. Pelatihan Kepemimpinan Tk. IV | : 85,96 (B) |
| 3. Pelatihan Dasar CPNS | : 84,71 (B) |
- C. Catatan Perbaikan** :
1. Perlu percepatan bagi Pengelola untuk mengikuti MOT dan Diklatpim bagi yang belum;
 2. Perlu percepatan bagi Penyelenggara untuk mengikuti TOC bagi yang belum;
 3. Perlu berkoordinasi dengan LAN dalam penyelenggaraan MOT dan TOC;
 4. Memaksimalkan peran Tim Penjamin Mutu dalam melakukan monitoring dan evaluasi dan menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi;
 5. Perlu mengoptimalkan pemanfaatan SIPKA untuk update data dan pemanfaatan sistem informasi untuk penyelenggaraan pelatihan;
 6. Perlu mengupdate bahan ajar yang dilakukan oleh para Widyaiswara;
 7. Perlu mendorong para Widyaiswara untuk melakukan kegiatan yang mendukung penguasaan substansi;
 8. Perlu mengoptimalkan penggunaan instrumen penyelenggaraan untuk memonitor pelaksanaan pelatihan secara komprehensif;
 9. Diseminasi produk pelatihan (proyek perubahan/aktualisasi) perlu dilakukan di berbagai media baik konvensional maupun elektronik;
 10. Perlu percepatan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelatihan;
 11. Perlu pembangunan sistem informasi pelaksanaan pelatihan (*website*, aplikasi pembelajaran dan *complaint handling*).

Jakarta, 18 Juli 2019
Deputi Bidang Kebijakan
Pengembangan Kompetensi ASN


Muhammad Taufiq